"DINAMIKA" ***adalah analisis enam-bulanan kondisi perburuhan di Indonesia yang didasarkan pada kliping koran dan majalah*** **(Kompas, Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Koran Tempo, Republika, Pikiran Rakyat, Jawa Pos, Bernas, Tempo, Gatra, Tempo Interaktif),** ***beberapa buletin dan majalah perburuhan, serta sumber-sumber lain yang terkait. Analisis ini terutama menyoroti dua aspek dalam isu perburuhan, yaitu resistensi buruh dan peluang pembangunan gerakan buruh dalam upaya memahami kondisi perburuhan untuk penguatan gerakan buruh***

==========

"DINAMIKA"

DINAMIKA PERBURUHAN INDONESIA
SEMESTER I, 2005

Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS)

Sepanjang 2004 lalu, pertumbuhan Produk Domestik Brutto (PDB) Indonesia hanya 4,8 persen, akan tetapi angka inflasi mencapai 5,6 persen. Negeri yang kini berpenduduk lebih dari 227 juta jiwa ini tahun lalu memiliki pendapatan per kapita 1.230 dolar AS per tahun (*The Economist*, edisi khusus 'The World in 2005', 2004) dengan struktur ekonomi yang masih sangat timpang.

Sejak krisis ekonomi 1997/98, kondisi perekonomian Indonesia relatif belum membaik dan terus diiringi dengan meroketnya angka pengangguran terbesar sepanjang sejarah. Masalah pengangguran akan terus menjadi batu sandungan perkembangan sosial-ekonomi negeri ini di masa-masa mendatang. Selain itu, beban pembayaran utang luar negeri pemerintah juga sudah di luar batas kemampuan. Negeri ini terjerat utang yang terus dikucurkan oleh lembaga-lembaga donor internasional dan negara-negara maju.

Terhitung sejak tahun 1980 sampai saat ini Indonesia sudah membayar utang luar negeri pemerintah tidak kurang dari 125 milyar dolar AS. Jumlah ini tidak termasuk utang swasta. Pemerintah juga masih mempunyai sisa utang yang harus dibayar tidak kurang dari 70 milyar dolar AS. Karenanya, setiap tahun pemerintah harus menguras perolehan devisa sedikitnya 8 hingga 9 milyar dolar AS untuk membayar cicilan pokok dan bunganya (Rachbini, 2005). Tak dapat dibayangkan hingga kapan Indonesia terbebas dari beban utang yang masing-masing dari 227,1 juta penduduknya menanggung Rp.7 juta per kepala.

Kemiskinan, Pengangguran, PHK

Beban utang luar negeri di atas membuat format Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak pernah mampu mendanai masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan yang sebagian besar diderita para buruh di berbagai sektor. APBN 2005 mengalokasikan Rp.64 triliun untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri, sementara biaya untuk sektor penunjang pembangunan kualitas manusia tidak lebih dari 1,5 persen (Rp 7,4 triliun sektor kesehatan, Rp 21,5 triliun pendidikan, dan Rp 3,679 triliun untuk sektor pertanian).

Sejak tahun 1999, angka penduduk miskin cenderung konstan. Jumlahnya hingga tahun 2004 masih mencapai 36,1 juta, lebih banyak dari tahun 1996 yang hanya 34,5 juta. Sekitar 2/3 dari jumlah penduduk miskin tersebut terdapat di pedesaan (lihat Tabel 1).

Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Desa dan di Kota, 1996-2004

Tahun	Kota		Desa		Kota + Desa	
	Jumlah	% terhadap Penduduk Kota	Jumlah	% terhadap Penduduk Desa	Jumlah	% terhadap Total Penduduk
1996	9.6	13.6	24.9	19.9	34.5	17.7
1998	17.6	21.9	31.9	25.7	49.5	24.2
1999	12.4	15.1	25.1	20.2	37.5	18.2
2000	12.3	14.6	26.4	22.4	38.7	19.1
2001	8.6	9.79	29.3	24.8	37.9	18.4
2002	13.3	14.5	25.1	21.1	38.4	18.2
2003	12.3	13.6	25.1	20.2	37.4	17.4
2004	11.3	12.1	24.8	20.1	36.1	16.7

Sumber: Statistik Indonesia , BPS

Sejumlah kesepakatan Indonesia dengan Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memaksa negeri ini menjalankan kebijakan pencabutan subsidi layanan publik, membuka pasar bagi produk impor, dan kebijakan fiskal yang mengabaikan hak-hak ekonomi rakyat. Parlemen dipaksa memproduksi peraturan yang memperlancar privatisasi (UU Sumber Daya Air, UU Kelistrikan, UU Sistem Pendidikan Nasional, dan lainnya), serta kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hukum dan aturan perburuhan juga dituntut mengadopsi konsep kelenturan pasar tenaga kerja (*labour market flexibility*) yang melayani investor tetapi mengabaikan kesejahteraan buruh. Akibatnya, buruh selalu berada dalam ancaman pemecatan (PHK) dengan tingkat eksploitasi yang kian meningkat.

Dalam catatan Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di Indonesia hingga Februari 2005 mencapai 105,8 juta orang, bertambah 1,8 juta orang dibanding Agustus 2004. Jumlah penduduk yang bekerja dalam periode yang sama hanya bertambah 1,2 juta orang, yang itu berarti telah muncul penganggur baru sebesar 600 ribu orang. Harus dicatat bahwa angka pengangguran di atas adalah angka konservatif dan jumlah riil mungkin lebih besar dengan asumsi bahwa sederet data menyebutkan angkatan kerja baru saja muncul 2,5 juta orang setiap tahunnya.

BPS juga mencatat bahwa pada Februari 2005 tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,3 persen (10,9 juta orang), lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2004 sebesar 9,9 persen (10.3 juta orang). Jumlah penduduk yang bekerja tidak penuh (pengangguran tertutup) pada Februari 2005 mencapai 29,6 juta orang atau 31,2 persen dari seluruh penduduk yang bekerja, lebih tinggi dari keadaan Agustus 2004 sebesar 29,8 persen (lihat Tabel 2).

Melimpahnya jumlah pengangguran diiringi pula dengan frekuensi PHK yang terjadi di beberapa sektor penting. Dalam grafik 1 terlihat bahwa dalam periode Januari hingga Juni 2005 buruh industri kehutanan dan perkebunan adalah yang terbesar terkena PHK (83 persen), disusul mereka yang bekerja di industri tekstil, sandang dan kulit (14 persen). Buruh di sektor perdagangan umum dan jasa, logam, elektronik dan mesin, serta transportasi masing-masing ter-PHK sebanyak satu persen dari total kejadian PHK selama semester I tahun 2005 ini. Menurunnya daya produksi dan kebijakan yang

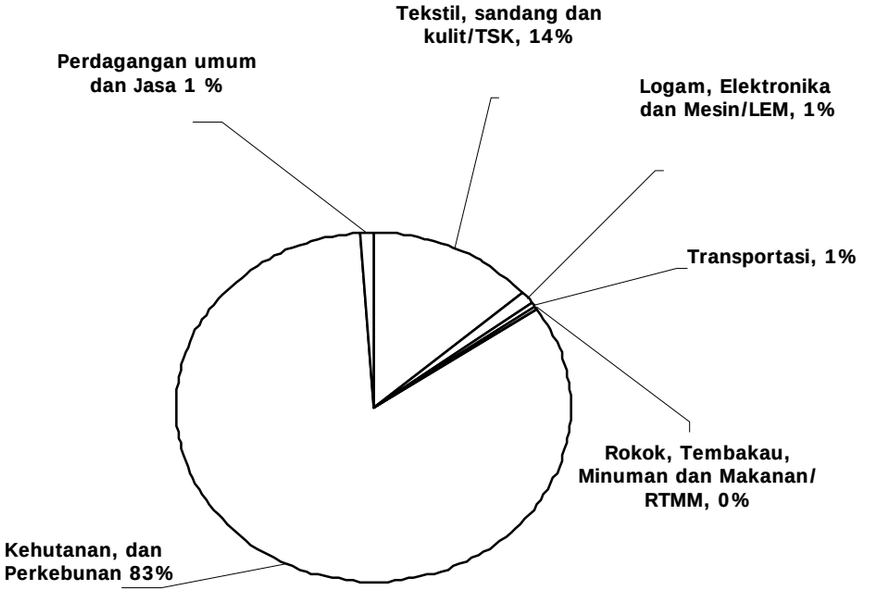
kontraproduktif bagi pengusaha adalah yang kerap kali menjadi alasan para pengusaha di industri kehutanan dan perkebunan – juga di industri tekstil, sandang dan kulit – untuk mem-PHK buruh.

Tabel 2
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama
Agustus 2004 dan Februari 2005
(Dalam Jutaan)

RINCIAN	Agust-2004	Feb-2005
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (juta)	153.9	155.5
Angkatan Kerja (juta)	104,0	105.8
a. Bekerja	93.7	94.9
b. Penganggur Terbuka	10.3	10.9
Bekerja Tidak Penuh (pengangguran terututp, juta)	27.9	29.6
a. Pengangguran tertutup sukarela (*voluntary*)	14.5	15.3
b. Pengangguran tertutup tanpa sengaja (*unvoluntary*)	13.4	14.3
Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya)	49.9	49.7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, (%)	67.6	68,0
Tingkat Pengangguran Terbuka, (%)	9.9	10.3
Tingkat Pengangguran Tertutup, (%)	29.8	31.2

Sumber: BPS

Grafik 1
Frekuensi PHK Bulan Januari – Juni 2005



Sumber : Kliping berita perburuhan, diolah oleh LIPS

Harus diakui bahwa hingga saat ini industri di Indonesia masih mengandalkan produk bernilai tambah rendah yang dihasilkan industri padat buruh dengan tingkat keahlian dan teknologi yang juga rendah, yang antara lain tercermin dalam potret suram industri

kayu, tekstil, garmen, kulit, makanan, minuman dan barang-barang elektronik sederhana berupa komponen. Daya saing yang rendah sering kali diklaim pengusaha akibat kenaikan upah yang terus dituntut buruh, padahal sumber-sumber lain yang mengakibatkan biaya produksi menjadi tinggi, termasuk prosedur dan biaya birokrasi yang tidak sedikit, menyumbang secara berarti atas rendahnya daya saing produk manufaktur Indonesia.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan pun secara keseluruhan mengalami penurunan. Sampai triwulan ketiga 2003, industri manufaktur hanya tumbuh 2,3 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sepanjang 2002 (4,1 persen). Di sisi penyerapan buruh juga terjadi demikian, tahun 2002 penyerapannya hanya 0,2 persen, jauh lebih rendah dibandingkan penyerapan pada 2001 (3,8 persen).

Di sektor formal, kesempatan kerja dalam lima tahun terakhir ini terlihat cenderung menciut dengan perbedaan upah yang kian lebar antara lapangan kerja formal dan informal. Industri manufaktur (pengolahan) pun produktivitasnya menurun. Sebetulnya, sektor manufaktur belum mampu menyerap tenaga kerja secara lebih banyak dari pedesaan (pertanian), sehingga penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian masih relatif besar. Maka salah satu solusi sebetulnya ialah dengan melakukan pembangunan pertanian dan pedesaan, karena sekitar 65 persen penduduk Indonesia berada di pedesaan; sekitar 44 persen angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian (dalam arti luas); sekitar 16 persen PDB nasional berasal dari sektor pertanian; dan kajian-kajian ekonomi menyimpulkan bahwa produk-produk pertanian memiliki efek memicu (*multiplier effects*) dan keterkaitan *(forward and backward linkages)* yang tinggi dengan sektor-sektor lain.

Kendati demikian, alokasi dana dari pemerintah bagi sektor pertanian masih relatif kecil: rata-rata rasio pengeluaran tersebut terhadap PDB sekitar 0,3 persen, sementara sumbangan *output* sektor pertanian ini terhadap PDB mencapai sekitar 16,3 persen. Kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pertanian/agraria relatif rendah, bahkan cenderung 'membunuh' sektor ini dan pada saat yang sama menggencarkan industrialisasi di sektor lainnya. Trend ini memang terjadi secara merata di negeri-negeri ASEAN lain akibat desakan globalisasi ekonomi dengan hadirnya perusahaan-perusahaan multinasional yang merangsek. Perusahaan-perusahaan multinasional ini menuntut iklim investasi yang kondusif, termasuk dengan menekan negara agar membatasi arena yang tersedia bagi buruh yang terorganisasi (Hadiz, 2004).

Upah riil Menurun

Kenaikan harga BBM pada Februari 2005 menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat, menurunkan daya beli para buruh yang baru saja menuntut kenaikan upah yang tak seberapa. Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun 2005 ditetapkan dengan kenaikan rata-rata sekitar 0,25 persen, dengan penetapan UMP tertinggi bagi provinsi DKI sebesar Rp.771.843,00, diikuti Papua (Rp.700.000,00), Nanggro Aceh Darussalam (Rp.620.000), Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Sumatera Utara (masing-masing Rp.600.000), dan Banten (Rp.585.000). selebihnya di bawah nilai UMP Banten.

Data di bawah ini menunjukkan bahwa upah riil buruh industri (total) dari triwulan I 2004 sampai triwulan I 2005 cenderung menurun. Pada triwulan I 2005 upah buruh industri (total) mengalami penurunan, baik terhadap triwulan sebelumnya maupun terhadap triwulan yang sama tahun 2004. Ini tentu menegaskan fakta penurunan daya beli buruh industri. Trend penurunan upah riil terjadi di semua jenis industri kecuali industri rokok. Pada industri batubara dan ubin, baik upah nominal maupun upah riil keduanya cenderung menurun (lihat Tabel 3).

Tabel 3

RINCIAN		TW 1 2004	TW 2 2004	TW 3 2004 *)	TW4 2004 *)	TW 1 2005 **)
Industri (Total)	*Nominal*	819,121	860,329	818,502	855,648	879,001
	Riil	283,725	289,244	273,787	279,203	277,980
Industri Rokok	*Nominal*	505,807	491,296	508,092	509,396	598,020
	Riil	164,811	165,175	169,955	166,219	189,121
Industri Garmen	*Nominal*	780,873	797,196	791,355	847,268	818,135
	Riil	275,881	268,019	264,706	276,469	258,731
Industri Batubara, Ubin	*Nominal*	488,605	526,458	422,407	421,198	417,515
	Riil	161,553	176,996	141,294	137,440	132,037

Sumber: BPS
ket: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Di lain pihak, ternyata terdapat kecenderungan bahwa trend peningkatan upah buruh tani lebih lambat dibandingkan trend peningkatan upah di sektor manufaktur, sehingga kemiskinan di pedesaan cenderung lebih banyak dibandingkan di perkotaan, seperti tampak dalam Tabel 1 di atas. Rendahnya upah tersebut memicu peningkatan angka putus sekolah, yang oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional pada periode 2004/2005 diproyeksikan mencapai 1.122.742 anak pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Menengah dan Tingkat Atas. Jumlah anak putus sekolah terbesar di tingkat SD, yakni 685.967 anak.

Resistensi Organisasi Buruh dalam Peristiwa Aksi

Semakin menghilangnya proteksi terhadap industri nasional yang menggelembungkan jumlah kebangkrutan industri dan pengangguran, baik karena PHK maupun karena menyempitnya lapangan kerja di sektor formal, memberikan suasana politik yang tetap kondusif bagi bangkitnya gerakan buruh.

Sementara ini mempertahankan politik upah rendah dan mendorong fleksibilitas perburuhan sebagai upaya untuk menggairahkan dunia industri adalah jawaban yang secara politik kerap diucapkan pemerintah. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Aburizal Bakri, sebulan setelah dilantik menjadi anggota Kabinet Indonesia Bersatu menyatakan hendak merombak berbagai aturan yang terkait dengan investasi, termasuk di dalamnya aturan perburuhan.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disusun tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang saat itu dipimpin Sri Mulyani, secara eksplisit menyatakan hendak mendorong penerapan sistem perburuhan fleksibel sebagai jalan untuk memecahkan persoalan pengangguran yang menjulang. Bagi buruh, dengan melongok pada kenyataan yang terjadi di lapangan, jawaban politik ini sama dengan menekan upah mereka supaya tetap rendah, memudahkan pengusaha untuk menyewa dan memecat (*hire and fire*), dan mencabut jaminan politik atas kelangsungan kepentingan produksi mereka. Dengan demikian, jawaban yang diajukan pemerintah

memperjelas watak dan karakter pemerintah yang berkuasa melalui pemilu langsung 2004 tersebut, sebagai pemerintahan yang anti-buruh.

Dinamika gerakan buruh pada semester I 2005 ini memang secara kasat mata belum secara signifikan dapat mempengaruhi kehidupan politik secara nasional. Meski demikian, bukan berarti gerakan buruh mengalami penurunan secara kualitas. Pada saat ini, di samping, tema-tema aksi-aksi yang secara "tradisional" menjadi kekhasan gerakan buruh, seperti upah, penolakan PHK, dan lain-lain, gerakan buruh juga kerap berpartisipasi dalam momentum-momentum protes atas berbagai kebijakan politik pemerintah di luar sektor perburuhan namun tetap terkait dengan kepentingan sosial ekonomi buruh.

Misalnya aksi-aksi gerakan buruh menolak perundingan utang antara Republik Indonesia dengan Consultative Group on Indonesia (CGI) pada bulan Februari 2005. Selain itu aksi-aksi buruh memperingati Hari Perempuan se-Dunia pada bulan Maret 2005. Selain itu, aksi-aksi buruh dalam aliansi luas memperingati 50 tahun Semangat Bandung, serta aksi-aksi penolakan dan tuntutan penurunan harga bahan bakar minyak dan gas di berbagai daerah.

Perhatian pemerintah yang lebih besar memang tertuju pada gerakan penolakan kenaikan harga BBM. Momentum kenaikan harga BBM memang kerap memicu naiknya keresahan sosial dan mendorong gerakan massa secara luas. Kalangan yang paling terjepit oleh isu ini adalah sektor transportasi. Namun efek kenaikan ini memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan dan secara konsisten menekan pendapatan karena memicu inflasi. Meskipun secara politik paling terkena dampak kenaikan BBM, namun gerakan buruh sektor transportasi sepertinya masih belum beranjak secara kualitatif. Di berbagai daerah, fokus isu atas kenaikan ini masih berkisar pada penyesuaian tarif yang sebenarnya tidak populer di kalangan lain yang justru menuntut pencabutan kebijakan kenaikan BBM. Padahal tuntutan penyesuaian tarif yang notabene menaikan harga transportasi kerap memicu kontradiksi di sesama buruh sektor transportasi. Meski demikian tidak semua kalangan di sektor ini menyuarakan tuntutan penyesuaian tarif. Paling tidak, gerakan buruh transportasi di kota Palembang menyuarakan tuntutan menolak kenaikan harga BBM.

Aksi menentang kenaikan harga BBM juga dilakukan aliansi buruh lintas sektoral di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Batam, Tangerang. Di antara kelompok buruh yang berdemonstrasi, ada juga yang mengangkat isu perempuan. Kelompok ini, Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang anti-buruh sangat berdampak serius pada perempuan yang dalam kondisi saat ini dapat memicu tingginya angka kriminalitas dan kekerasan atas kelompok perempuan. Aksi ini dilaksanakan terkait dengan peringatan Hari Perempuan Pekerja se-Dunia yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2005 dan isu kenaikan harga BBM.

Melalui berbagai aksi, indikasi menguatnya kesadaran politik di kalangan buruh, mulai tampak signifikan. Kesadaran untuk bersatu dan membangun kerjasama politik bersama elemen-elemen demokratis di dalam negeri mulai terlihat cukup berarti. Tuntutan-tuntutan buruh pun mulai di sampaikan oleh elemen-elemen gerakan non-buruh, seperti gerakan tani, pemuda dan mahasiswa, serta gerakan perempuan. Perayaan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2005 pun tidak hanya diperingati dan diikuti oleh buruh. Hal ini ditunjukkan dari isu yang disampaikannya pun tidak melulu isu-isu perburuhan. Kami mencatat, di beberapa kota, gerakan aksi satu Mei (*Mayday*) membawa isu-isu seperti reforma agraria, pendidikan murah, kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, lapangan kerja, industrialisasi nasional, dan tentu saja isu-isu perburuhan seperti kenaikan upah, menolak PHK dan sistem kerja kontrak, menuntut jaminan sosial, dan lain-lain.

Hanya saja, tingkat penindasan yang sangat tinggi, yang memaksa buruh-buruh untuk bekerja lebih lama dengan upah yang lebih rendah, masih menjadi hambatan bagi buruh untuk tampil merespon setiap politik pemerintah, baik yang terkait dengan masalah perburuhan itu sendiri maupun masalah-masalah sosial lainnya. Selain itu, kreativitas dalam mengolah isu dan menampilkannya dalam aksi-aksi yang simultan juga masih mengalami kendala. Situasi yang secara umum dihadapi berbagai serikat buruh adalah sulitnya melakukan konsolidasi politik di internal masing-masing akibat tingginya intensitas reorganisasi struktur produksi di tingkat basis yang paling rendah (pabrik).

Tuntutan kenaikan upah yang layak juga memicu aksi para buruh dalam semester I 2005 ini. Di Batam, Forum Pekerja Galangan Kapal dan Industri Elektronik dan Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) pada Januari 2005 menurunkan seribuan anggotanya untuk menolak upah minimum yang ditetapkan pemerintah (Rp.635.000). Upah tersebut dianggap jauh berbeda dengan kebutuhan hidup minimum.

Tabel 4
Data Aksi dan Keterlibatan Buruh dalam Aksi
Januari - Juni 2005

Sektor	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Jumlah	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Manufaktur	3	700	2	3.650	5	823	4	790	6	3.950	1	1.000	21	10.913
Pertambangan dan Kimia	3	1.150					2	340	3	550	1	150	9	2.190
Transportasi, Komunikasi dan media massa	1	150	1	50	7	550	4	3.570			2	2..300	15	6.620
Listrik, Air dan Gas									1	50			1	50
Keuangan	1	50			2						1	67	4	117
Pertanian dan Perkebunan			1	500	1	2.500	2	1.300			1	1.000	5	5.300
Perdagangan umum dan Jasa	1	150	3	150	10	650	6	4.420	2	250	3	4.300	25	9.920
Aliansi/Serikat Buruh	2	60	1	150	5	2.900	4	2.200	8	18.300			20	23.610
												Total	100	58.720

Keterangan : A = Frekuensi Aksi; B = Jumlah keterlibatan buruh dalam aksi
Sumber: Kliping berita perburuhan, diolah oleh LIPS. Angka tersebut konservatif, hanya berdasarkan kliping yang mungkin luput mencatat banyak aksi seperti yang terjadi di daerah

Catatan untuk Gerakan Buruh

Fenomena-fenomena yang terjadi di atas tentu tak lepas dari pengaruh globalisasi yang kini merambah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk terhadap nasib buruh. Seperti truk raksasa yang terus meluncur, globalisasi telah berpengaruh luas hingga pada terancamnya nilai-nilai aksi kolektif serikat buruh. Dalam hal kompromi modal dan buruh yang pada abad lalu telah menghasilkan konsep negara kesejahteraan, globaliasi telah mengancam terkikis-habisnya konsep negara kesejahteraan tersebut di negara-negara maju, serta lenyapnya perlindungan negara atas hak-hak ekonomi-politik warga di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Walaupun konsep globalisasi masih sengit diperdebatkan, tentu sangat mudah bagi kita untuk menyaksikan kenyataan bahwa gerak modal yang secara dramatis meningkat dalam tiga puluh tahun terakhir telah menjadikan modal memiliki kekuasaan struktural yang lebih kuat dibanding negara yang tak bergerak dan buruh yang umumnya statis. Perubahan tersebut lebih lanjut telah memperkuat modal yang secara internasional berpindah menuntut iklim investasi yang kondusif, termasuk dengan menekan negara agar membatasi arena yang tersedia bagi serikat buruh. Akibatnya, telah terjadi

depolitisasi masyarakat dan disorganisasi buruh secara luas di negara-negara Asia tenggara, termasuk Indonesia yang rezimnya hingga kini predatoris: rezim yang secara rakus melakukan penguasaan kepentingan publik untuk kepentingan privat; yang mengendalikan kehidupan ekonomi dengan penggunaan kekuasaan ketimbang menata aturan-aturan; yang menggunakan kekuasaan secara represif untuk mendisorganisasi masyarakat sipil (*civil society*).

Politik gerakan buruh di Indonesia, seperti halnya di negeri-negeri Asia Tenggara lainnya, telah ditekan sedemikian rupa agar mengadopsi "keserikatburuhan ekonomi" ketimbang "keserikatburuhan politik" yang dulu hadir dalam masa-masa perlawanan atas penjajahan. Tradisi "keserikatburuhan politik" pun kini hancur dengan dampak telah terbatasnya perjuangan buruh pada kesejahteraan ekonomi yang lepas dari agenda sosial dan politik yang lebih luas. Saat ini, dalam melawan penjajahan yang tak kasat mata, amat penting bagi gerakan buruh untuk berpikir bahwa merupakan kekeliruan untuk membatasi diri mereka hanya pada visi ekonomi. Perjuangan untuk mendapatkan hak-hak ekonomi dan tingkat kesejahteraan secara esensial juga merupakan sebuah perjuangan politik.

Memang hingga sekarang belum ada satu strategi yang mendasar yang telah ditemukan oleh serkat buruh untuk menghadapi tantangan-tantangan globalisasi. Tetapi langkah awal yang perlu dilakukan ialah memunculkan kembali tradisi keserikatburuhan politik dan meraih kembali ruang politik sebagai satu sasaran perjuangan buruh yang sah. Bagaimanapun, masalah pengorganisasian buruh harus direfleksikan bahwa ia juga terkait dengan upaya penyadaran politik buruh. Kesadaran politik inilah yang kelak akan mendorong buruh berpartisipasi dalam kerja-kerja serikat. Tentu menjadi tantangan yang cukup berat bagi setiap pengurus serikat buruh saat ini untuk memperbesar ruang partisipasi dan mendorong anggotanya berperan dalam kerja-kerja serikat. Yang lebih penting lagi, aliansi dan menyatunya berbagai elemen buruh dalam satu wadah perjuangan mesti terus ditingkatkan, dijalin dan tetap dipelihara. Kerja sama antarelemen buruh sangat penting bagi bangkitnya gerakan buruh yang kuat.***

L I P S
Lembaga Informasi Perburuhan Sedane
Sedane Institute for Labour Information
Jl. Dewi Sartika No.52F Bogor 16121 Indonesia
Ph/Facs.: +62-251-344473
Email: lips@lips.or.id
http//:www.lips.or.id

© 2005 by LIPS, all rights reserved

Penyebaran "DINAMIKA" ini sangat dianjurkan.
Pengutipan atas data dalam naskah ini harap mencantumkan sumber.